



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya Pemerintah Rwanda dalam Mewujudkan *Cashless Society*
pada Era Globalisasi Digital (2015-2018)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Helen Winata

2016330125

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya Pemerintah Rwanda dalam Mewujudkan *Cashless Society*
pada Era Globalisasi Digital (2015-2018)**

Skripsi

Oleh

Helen Winata

2016330125

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

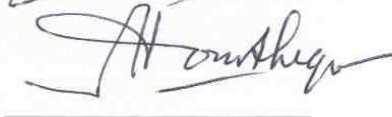
Nama : Helen Winata
Nomor Pokok : 2016330125
Judul : Upaya Pemerintah Rwanda dalam Mewujudkan *Cashless Society* pada Era Globalisasi Digital (2015-2018)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 7 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

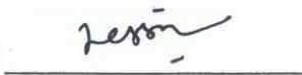
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris
Dr. Atom Ginting Munthe, Drs., M.Si.

: 

Anggota
Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Helen Winata
Nomor Pokok : 2016330125
Judul : Upaya Pemerintah Rwanda dalam Mewujudkan *Cashless Society* pada Era Globalisasi Digital (2015-2018)

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 18 Desember 2019

Pembimbing,

Dr. Atom Ginting Munthe

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Sylvia Yazid, Ph.D

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helen Winata

NPM : 2016330125

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Rwanda dalam Mewujudkan *Cashless Society* pada Era Globalisasi Digital (2015-2018)

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Desember 2019

Helen Winata

2016330125

ABSTRAK

Nama : Helen Winata

NPM : 2016330125

Judul : Upaya Pemerintah Rwanda dalam Mewujudkan *Cashless Society* pada Era Globalisasi Digital (2015-2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dalam mewujudkan masyarakat non-tunai atau *cashless society* di negaranya. Sebagai negara yang pernah mengalami masa kelam akibat genosida yang terjadi pada tahun 1994, kehadiran Paul Kagame sebagai Presiden Rwanda berhasil mengeluarkan negara ini dari keterpurukan. Melalui berbagai programnya, Paul Kagame berupaya untuk mengubah basis ekonomi Rwanda, dari agrikultur menjadi ilmu pengetahuan atau *knowledge economy*. Selain itu, Paul Kagame juga ingin menjadikan Rwanda sebagai salah satu negara yang tergabung kedalam *Middle Income Country* (MIC) di tahun 2035 dan bahkan *High Income Country* (HIC) di tahun 2050. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Rwanda mengupayakan *cashless society* karena dianggap lebih memberikan banyak keuntungan serta mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ekonomi negara.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, “Bagaimana Pemerintah Rwanda Mengupayakan *Cashless Society* pada Era Globalisasi Digital Tahun 2015-2018?”, penulis menggunakan teori *Stage of Economic Growth* menurut Walt Whitman Rostow terkait kesiapan masyarakat dan pemerintah, *Information and Communication Technology* (ICT) sebagai salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan transaksi digital atau *digital transaction*, serta fungsi-fungsi media menurut Denis McQuail. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sebuah *cashless society*, secara domestik di tahun 2015, Pemerintah Rwanda mengeluarkan kebijakan *The New Investment Law of 2015*, dan untuk mencapai target di tahun 2024 sebagai negara yang *cashless* dibentuk *Rwanda’s Payment System Strategy: Towards a Cashless Rwanda 2018-2024*, serta mendukung salah satu perusahaan media terbesar, *The New Times* untuk terus memberikan informasi yang membangun masyarakat. Sementara, upaya lain yang melibatkan pihak dari luar negara yang dilakukan yakni meningkatkan layanan *Mobile Money* (MoMo), membangun kerja sama dengan *Andela Contract*, membangun *Kigali Innovation City* (KIC), serta terpilih kembali menjadi Dewan *International Telecommunication Union* (ITU) di tahun 2018 karena dianggap mengalami pertumbuhan ICT yang sangat baik.

Kata-kata kunci: *ICT*, Transaksi Digital, Masyarakat Non-tunai (*Cashless Society*), Pemerintah Rwanda

ABSTRACT

Name : Helen Winata
Student ID : 2016330125
Thesis Title : *Rwanda Government Efforts to Realize Cashless Society in the Era of Digital Globalization (2015-2018)*

This study aims to explain the efforts made by the Rwandan Government in realizing cashless society in the country. As a country that had experienced a dark period due to the genocide that occurred in 1994, Paul Kagame's presence as President of Rwanda succeeded in removing this country from adversity. Through his various programs, Paul Kagame seeks to change Rwanda's economic base, from agriculture to knowledge economy. In addition, Paul Kagame also wants to make Rwanda one of the countries that are members of the Middle Income Country (MIC) in 2035 and even High Income Country (HIC) in 2050. To make this happen, the Rwandan Government is striving to realize a cashless society because it is seen as providing more benefits, as well as influencing the speed of the country's economic growth.

To answer the research question, "How is the Rwandan Government Striving for a Cashless Society in the Era of Digital Globalization in 2015-2018?", the author uses the Stage of Economic Growth theory according to Walt Whitman Rostow related to the readiness of the community and government, Information and Communication Technology (ICT) as one of the most important parts in realizing digital transactions, as well as media functions according to Denis McQuail. The result of this study indicate that to realize a cashless society, domestically in 2015, the Rwanda Government issued a policy The New Investment of Law of 2015, and to achieve the target in 2024 as a cashless country, Rwanda Government also formed Rwanda's Payment System Strategy: Towards a Cashless Rwanda 2018-2024, and supports one of the largest media company, The New Times to continue to provide information to build Rwandan Community. Meanwhile, other efforts involving parties from outside the country are made that improving service of the Mobile Money (MoMo), establishing cooperation with Andela Contract, build Kigali Innovation City (KIC), and was re-elected as one of International Telecommunication Union (ITU) Council in 2018 for being experienced excellent ICT growth.

Keywords: *ICT, Digital Transaction, Cashless Society, Rwanda Government*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala berkat dalam setiap langkah penyusunan skripsi hingga mampu menyelesaikan tepat pada waktunya. Penelitian ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dalam mewujudkan *cashless society* di negaranya, dan merupakan prasyarat untuk menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini mencakup analisa mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dalam mewujudkan sebuah *cashless society* di negaranya, dimana upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengubah basis ekonomi Rwanda, dari agrikultur menjadi ilmu pengetahuan atau *knowledge based economy*. Selain itu, Pemerintah Rwanda juga ingin menjadikan Rwanda sebagai salah satu negara yang tergabung kedalam kategori *Middle Income Country* (MIC) di tahun 2035 dan *High Income Country* (HIC) di tahun 2050 mendatang. Sistem *cashless* sendiri dipilih oleh Pemerintah Rwanda karena dianggap mampu memberikan banyak keuntungan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi negara.

Penulis mengucapkan Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing, Dr. Atom Ginting Munthe yang telah memberi arahan selama proses penulisan skripsi ini hingga penulis mampu menyelesaikan dengan hasil terbaik. Maka dari itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi karya yang bermanfaat. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ini.

Bandung, 10 Desember 2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

- **Tuhan Yesus** atas segala berkat, penyertaan dan perlindunganNya.
- Almh. **Icih Yunianah** selaku Nenek dari penulis. Terima kasih untuk segala bentuk kasih sayang, dukungan dan kepercayaan yang diberikan sejak awal penulis menempuh perkuliahan ini. Meskipun raga sudah tidak dapat bertemu, namun penulis sangat bersyukur atas setiap waktu berharga yang pernah dihabiskan bersama.
- **Yan Winata** dan **Novi Kristianti** selaku orang tua dari penulis, terima kasih untuk segalanya. *I'm so grateful having the best parents in the world that I couldn't ask for more.* Juga untuk **Marvin Matius Winata** selaku adik penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis selama menempuh perkuliahan ini.
- **Angelia Kristianti** selaku bibi sekaligus kakak bagi penulis yang selalu ada, memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih.
- Bang **Aknolt Kristian Pakpahan** dan Mba **Benedikta Cucu** yang telah banyak membantu urusan administrasi dan beasiswa penulis sejak awal masa perkuliahan. Terima kasih.
- Mba **Ratih Indraswari** selaku dosen wali terbaik, terima kasih untuk segala dukungan dan perhatian yang diberikan.
- Bang **Atom Ginting Munthe** selaku dosen pembimbing terbaik, terima kasih untuk setiap waktu yang disempatkan, perhatian, saran serta arahan yang diberikan selama membimbing penulis sehingga akhirnya dapat selesai tepat waktu. Juga kepada Mas **Giandi Kartasmita** dan Mba **Jessica Martha** selaku dosen penguji, terima kasih untuk waktu dan setiap saran serta arahan yang diberikan sehingga hasil dari penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
- Sahabat Kos Laris Salon, **Yosefin Noviana**, **Andreas Diwan**, **Aldi Sitorus**, **Lea Firdausya**, **Herbet Sutanta**, **Yoana Mariana**, **Belinda Solihin**, **Verent Oktavia** terima kasih untuk setiap waktu dan kebersamaan yang

ada, juga setiap canda tawa yang diberikan. Semoga sukses selalu.

- **Yosefin Noviana**, *thank you for standing by my side when times get hard, I will always remember those random nights we're talked about life and stuff. I'm so lucky to have you as my unbiological sister. You are the best and I love you.*
- **Cynthia Tanudjaja**, *time flies and of course we've been through so much. Thank you Cyn for always being there through ups and downs, thank you for all the time we spent together, I thank God for giving me you as my bestfriend. Finally we did it! Remember Nelson Mandela said it always seems impossible until it's done HAHA I'm so proud and happy for you.*
- Teman-teman Delegasi Kuwait, **Cynthia Tanudjaja, Olivia Bernadeth, Lea Florencia, Vivi Natalia, Vianney Anette, Robby Cahyadi, Adelia Alviani, Abigail Loemongga**, dan *Head of Government Juwita Anggit*. Terima kasih untuk setiap momen yang telah kita habiskan bersama untuk berjuang menyelesaikan Praktik Diplomasi dengan baik. Semoga sukses dan bahagia selalu.
- **Priscilia Christian Kadim**, terima kasih untuk setiap cerita, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, semoga selalu sukses dan menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang.
- Sahabat-sahabat penulis semasa SMA, **Parveen Baby Chandra, Esther Marcellina, Yosan Fernando Handoko, Deden Yoshua Odie, Daniel Markho**, dan **Geraldly Suryahartanto**. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan untuk penulis. Semoga selalu sukses dan bahagia.
- **Denis Setiawan** dan **Stevanus Yustiawan**, terima kasih atas setiap kebersamaan sejak SD hingga saat ini. Semoga *project* kita bertiga sukses!
- *Last but not least*, Koko dr. **Rusli Suhandi**, *thank you for being my rock. Thank you for being there through hard times, especially these past few stressful-months during this undergraduate thesis preparation. Thank you for always listening, supporting and encouraging me. Good luck for your internship and upcoming projects, doc. I'm so grateful to have you and will always be proud of you.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR AKRONIM.....	x

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.2.1 Deskripsi Masalah	10
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	12
1.2.3 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.4 Kajian Literatur	14
1.5 Kerangka Pemikiran.....	18
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.6.1 Metode Penelitian	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	25
1.7 Sistematika Pembahasan	26

BAB II

PERKEMBANGAN ERA GLOBALISASI DIGITAL DAN CASHLESS SOCIETY28

2.1 Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Pre-Kondisi Masyarakat.....	31
2.1.1 Kontribusi <i>Information and Communication Technology</i> (ICT) dan <i>Internet</i> Terhadap Negara-Negara di Wilayah Afrika	35
2.2 Era Globalisasi Digital: Media Informasi dan Transaksi Digital.....	37
2.2.1 Media Informasi pada Era Globalisasi Digital	37
2.2.2 Transaksi Digital (<i>Digital Transaction</i>) dan Masyarakat Non-Tunai (<i>Cashless Society</i>)	40

BAB III

KESIAPAN MASYARAKAT RWANDA MENJADI SEBUAH CASHLESS SOCIETY.....43

3.1 Profil Negara Rwanda dan Kepemimpinan Paul Kagame	46
3.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Rwanda.....	52
3.3 Kesiapan Masyarakat Rwanda Menuju <i>Cashless Society</i>	57

BAB IV

UPAYA PEMERINTAH RWANDA MEWUJUDKAN CASHLESS SOCIETY PADA TAHUN 2015-2018.....60

4.1 Upaya Pemerintah Rwanda Melalui Lingkup Domestik	65
4.1.1 <i>The New Investment Law of 2015</i>	65
4.1.2 <i>Rwanda's Payment System Strategy: Towards a Cashless Rwanda 2018-2024</i>	68
4.1.3 Media <i>The New Times</i>	71
4.2 Upaya Pemerintah Rwanda Melalui Lingkup Internasional	73
4.2.1 Peningkatan Layanan <i>Mobile Money</i> (MoMo).....	73
4.2.2 Kerja Sama dengan Andela	77
4.2.3 Pembangunan <i>Kigali Innovation City</i> (KIC).....	79

4.2.4 Menjadi Anggota Dewan <i>International Communication Union</i> (ITU)	81
4.3 Pentingnya <i>Cashless Society</i> di Rwanda.....	83

BAB V

KESIMPULAN.....	84
------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Prestasi Rwanda Setelah Dimpimpin Paul Kagame	49
Gambar 4.1	: Mesin <i>Tap and Go</i> Milik AC Group.....	65
Gambar 4.2	: Penggunaan <i>Mobile Wallet</i> di Rwanda	74

DAFTAR AKRONIM

CBR	Commercial Bank of Rwanda
FDI	Foreign Direct Investment
GDP	Gross Domestic Product
HIC	High Income Country
ICT	Information and Communication Technology
IGC	International Growth Center
IoT	Internet of Things
ITU	International Telecommunication Union
KIC	Kigali Innovation City
MIC	Middle Income Country
MINECOFIN	Ministry of Finance and Economic Planning
MNO	Mobile Network Operators
MoMo	Mobile Money
NBR	National Bank of Rwanda
NICI	National Information Communication Infrastructure
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
POS	Point of Sales
QR	Quick Response
RIEC	Rwanda Enterprise Investment Company
RIEPA	Rwanda Investment and Export Promotion Agency
RDB	Rwanda Development Board
RPF	Rwandan Patriot Front
RRA	Rwanda Revenue Authority
RURA	Rwanda Utilities Regulatory Authority

SDM	Sumber Daya Manusia
STEM	Science, Technology, Engineering, Math
TI	Teknologi Informasi
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UN	United Nations
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WB	World Bank

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan Revolusi Industri yang hingga kini masih terus berkembang telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap studi Hubungan Internasional, khususnya melalui kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau yang juga dikenal dengan *Information and Communication Technology* (ICT). Hal ini dikarenakan ICT telah menghadirkan berbagai kemudahan yang dapat diperoleh masyarakat di berbagai belahan dunia, terutama dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam berkomunikasi maupun bertransaksi. Keberadaan ICT sendiri bertujuan untuk menyediakan akses informasi melalui berbagai teknologi komunikasi, seperti *internet*, jaringan nirkabel (*wireless network*), ponsel dan media komunikasi lainnya.¹ Sehingga pertukaran informasi secara cepat, efektif dan efisien mungkin dilakukan dan berdampak pada penghapusan batas-batas antar negara (*borderless*) dalam dunia internasional.

Sementara itu, dalam melakukan kegiatan transaksi, keberadaan ICT telah memungkinkan adanya sistem baru dalam pembayaran, yakni pembayaran digital atau *digital payment*. Jika sebelumnya aktivitas transaksi dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai atau *cash*, sistem transaksi dengan menggunakan

¹ Tech Terms, *ICT Definition*. Tech Terms 4 Januari 2010. Diakses 2 September 2019.
<https://techterms.com/definition/ict>

digital payment bersifat non-tunai atau *cashless*. Hal ini mungkin dilakukan karena kini penggunaan uang tunai mulai tergantikan dengan kartu debit atau kredit, pembayaran cek atau *cheque payment*, *mobile banking*, dan *internet banking*.² Bahkan saat ini, telah banyak perusahaan swasta yang juga ikut berkontribusi dalam perkembangan sistem transaksi *cashless*, yakni berupa aplikasi yang nantinya dipasang pada ponsel pintar atau *smartphone* sehingga kegiatan transaksi lebih mudah dilakukan.

Namun, khusus sistem transaksi *cashless* melalui pemasangan suatu aplikasi di *smartphone*, hanya mungkin dilakukan apabila *smartphone* dihubungkan dengan koneksi *internet*. Hal ini semakin membuat maraknya sistem *cashless* yang berjalan dalam lingkup masyarakat, karena apabila dibandingkan, keuntungan yang didapatkan jauh lebih banyak. Beberapa keuntungan menggunakan sistem *digital payment* antara lain sering ada potongan harga atau diskon, kemudahan dalam melakukan transaksi, mengurangi kemungkinan terjadinya utang, mengurangi risiko kriminalitas, uang menjadi tidak mudah hilang atau terselip, lebih praktis, aman serta transparan, dan lain sebagainya.³ Berbagai keuntungan tersebut menjadikan sistem *cashless* mulai banyak diterapkan oleh banyak negara-negara maju. Namun, saat ini negara-negara berkembang, khususnya yang berada di benua Afrika juga mulai ikut menerapkan sistem *cashless* di negaranya.

² Rebekah Moss, *The History of Cashless Society*. Total Processing 30 April 2019. Diakses 25 Oktober 2019. <https://www.totalprocessing.com/blog/history-of-cashless-society-infographic>

³ Alexander Kusumapradja, *Plus Minus Uang Tunai dan Nontunai, Pilih Mana?*. Cosmopolitan 31 Maret 2018. Diakses 26 Agustus 2019. <https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/3/2018/13748/plus-minus-uang-tunai-dan-nontunai-pilih-mana>

Salah satu negara di Benua Afrika yang telah mencoba untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau *cashless* adalah Nigeria. Sejak tahun 2012, negara ini telah mulai menerapkan sistem *cashless* dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Beberapa hal yang menjadi alasan kuat mengapa sistem ini ingin diterapkan oleh pemerintah adalah dari segi kenyamanan, pengurangan biaya penanganan dan transportasi, meningkatkan pendapatan pajak bagi negara, menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, dan lain sebagainya.⁴ Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Nigeria adalah dengan memperkuat dan memperjelas dasar hukum yang menjadi pedoman dalam menerapkan sistem *cashless*, juga mencapai target di tahun 2020 menjadi negara yang termasuk ke dalam dua puluh besar negara dengan sistem ekonomi terbaik.⁵ Sistem *cashless* dengan persiapan yang baik serta target yang jelas mendorong negara-negara lain di Afrika untuk ikut menerapkan sistem *cashless*, salah satunya Rwanda yang memiliki target di tahun 2024 menjadi sebuah negara *cashless*.

Masyarakat non-tunai atau *cashless society* sendiri merupakan sebuah konsep ekonomi dimana transaksi keuangan dilakukan secara elektronik dan bukan menggunakan uang tunai. Dalam *cashless society*, masing-masing pihak memiliki kartu atau perangkat elektronik yang digunakan sebagai instrumen atau alat dalam melakukan transaksi. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan transaksi *cashless* yakni dengan *digital payment* seperti kartu kredit atau debit, *internet*

⁴ Nigerian Finder. *Cashless Policy in Nigeria: Meaning & Benefits*. Nigerian Finder. Diakses 7 Januari 2020. <https://nigerianfinder.com/cashless-policy-in-nigeria/>

⁵ Central Bank of Nigeria. *Cash-less Nigeria*. Central Bank of Nigeria. Diakses 7 Januari 2020. cbn.gov.ng/cashless/

banking, mobile atau *SMS banking*, dan lain sebagainya.⁶ Melihat banyak negara maju yang telah menerapkan sistem *cashless* di negaranya, beberapa negara berkembang termasuk Rwanda juga mulai tertarik menerapkan sistem serupa.

Rwanda merupakan salah satu negara yang terletak di Benua Afrika, tepatnya di Afrika Tengah. Setelah berhasil memperoleh kemerdekaan pada 1 Juli 1962, Rwanda sempat mengalami konflik yang menyebabkan terjadinya genosida pada tahun 1994. Berawal dari perebutan kekuasaan antar etnis dalam pemerintahan, hingga terjadi perang saudara yang berakhir genosida dan menewaskan sebanyak lebih dari 800,000 warga dalam kurun waktu kurang dari seratus hari, dimana sebagian besar korban berasal dari etnis Tutsi.⁷ Namun, adanya peran yang diberikan oleh Paul Kagame segera setelah menjabat di tahun 2000, Rwanda berhasil melewati masa kelam akibat genosida tersebut dan terus mengalami pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya melalui berbagai program dan kebijakan yang dilakukan.

Sejak memenangkan pemilihan umum di tahun 2000, hingga saat ini Paul Kagame masih dipercaya oleh masyarakat Rwanda untuk memimpin. Kepercayaan masyarakat tersebut terlihat dari hasil pemilihan umum di tahun 2003, 2010 dan terakhir di tahun 2017 yang menunjukkan Paul Kagame memenangkan suara sebanyak lebih dari 90%.⁸ Tentu saja hal ini disebabkan oleh kontribusi yang telah

⁶ Business Novice, *Definition of Cashless Society*. Business Novice. Diakses 2 September 2019. <http://businessnovice.net/definition/cashless-society/>

⁷ Tony Firman, *7 April 1994, Dimulainya Pembantaian Etnis Tutsi di Rwanda*. Tirto ID 7 April 2017. Diakses 28 Agustus 2019. <https://tirto.id/7-april-1994-dimulainya-pembantaian-etnis-tutsi-di-rwanda-cmhc>

⁸ BBC News, *Rwanda country profile*. BBC News 17 September 2018. Diakses 28 Agustus 2019. <https://www.bbc.com/news/world-africa-14093238#>

diberikan oleh Paul Kagame dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang berdasarkan pada kebijakan *Rwanda's Vision 2020*. Secara singkat, kebijakan tersebut dibentuk oleh Paul Kagame di tahun 2000 untuk mencapai target pertumbuhan negara di tahun 2020 mendatang. Pembangunan ekonomi masa pemerintahan Paul Kagame diawali dengan berfokus pada pertumbuhan tiga sektor utama, yakni ekspor teh dan kopi, penerimaan bantuan asing, serta sektor pariwisata.⁹ Dalam perjalanannya, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian tersebut dapat dikatakan berhasil. Kondisi ekonomi Rwanda mulai berangsur pulih, dimana sejak tahun 2001 pertumbuhan ekonomi negara mencapai kisaran 8% meskipun masih dua pertiga populasi atau sekitar tujuh juta penduduk masih hidup dibawah garis kemiskinan. Namun di tahun 2005, angka kemiskinan semakin turun dari 57% menjadi 45% di tahun 2010.¹⁰ Khususnya dalam penerimaan bantuan asing, pemerintah terus mengupayakan berbagai cara agar semakin banyak investor yang masuk dan ikut membangun perekonomian dan infrastruktur di Rwanda.

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, pemerintah juga berfokus meningkatkan investor asing, baik yang berasal dari komunitas bisnis lokal maupun internasional untuk mengembangkan bisnisnya di Rwanda.¹¹ Berbagai upaya yang

⁹ Emma Howard, *Rwanda, 20 years on: how a country is rebuilding itself*. The Guardian 3 April 2014. Diakses 28 Agustus 2019. <https://www.theguardian.com/global-development/2014/apr/03/rwanda-20-years-on-how-a-country-is-rebuilding-itself>

¹⁰ Rosamund Hutt, *5 Things to know about Rwanda's Economy*. World Economic Forum 7 April 2016. Diakses pada 28 Agustus 2019. <https://www.weforum.org/agenda/2016/04/5-things-to-know-about-rwanda-s-economy/>

¹¹ Forbes Africa, *Rwanda The Emerging Economy*. Forbes Africa 5 Desember 2018. Diakses 28 Agustus 2019. <https://www.forbesafrica.com/economy/2018/12/05/rwanda-the-emerging-economy-to-watch/>

dilakukan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui berbagai kebijakan maupun program yang ada yakni untuk mencapai status sebagai salah satu negara yang masuk kedalam kategori *Middle Income Country* (MIC) di tahun 2035 dan *High Income Country* (HIC) di tahun 2050.¹² Menurut Bank Dunia atau *World Bank* (WB), untuk ikut masuk dalam kategori MIC sendiri, sebuah negara harus memiliki penghasilan Produk Domestik Bruto (PDB) antara \$1,006 dan \$3,955; sementara apabila masuk kedalam kategori negara HIC, harus memiliki penghasilan PDB antara \$3,956 dan \$12,235.¹³ Negara-negara yang masuk kedalam kategori MIC maupun HIC mewakili sekitar sepertiga pendapatan global sekaligus mesin utama pertumbuhan global.¹⁴ Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda yakni menerapkan *cashless society* di negaranya.

Di tahun 2016, sebuah laporan yang ditulis oleh McKinsey, sebuah perusahaan konsultan manajemen global, mengatakan bahwa jasa keuangan digital berpotensi meningkatkan *Gross Domestic Product* atau GDP tahunan negara berkembang, termasuk Rwanda.¹⁵ Sementara itu, Gubernur *National Bank of Rwanda* (NBR), John Rwangombwa, mengatakan bahwa sistem *cashless* memungkinkan adanya penghematan biaya dan peningkatan sumber daya di lembaga keuangan, sehingga mampu mendorong lebih banyak investasi, meningkatkan produktivitas dan perputaran uang, memperbanyak kegiatan bisnis, menghasilkan peluang kerja dan

¹² The World Bank, *The World Bank in Rwanda*. The World Bank 30 September 2019. Diakses 13 November 2019. <https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/overview>

¹³ The World Bank, *The World Bank in Middle Income Countries*. The World Bank 5 November 2019. Diakses 22 November 2019. <https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview>

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ The New Times, *Rwanda to go cashless by 2024: Are you on board?*. The New Times 5 Desember 2017. Diakses 15 November 2019. <https://www.newtimes.co.rw/section/read/224911>

meningkatkan pendapatan pajak bagi negara.¹⁶ Hal ini semakin meyakinkan Pemerintah Rwanda untuk segera menerapkan sistem *cashless*.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Rwanda untuk mencapai tujuan sebagai negara yang sepenuhnya *cashless* di tahun 2024 yakni membuat program *National Information Communication Infrastructure* (NICI) yang diadopsi dari *Rwanda's Vision 2020* untuk secara khusus membantu negara berfokus pada pembangunan infrastruktur sektor ICT dan mempercepat Rwanda menjadi sebuah negara industrialisasi.¹⁷ Selain itu, mengeluarkan kebijakan *The New Investment Law of 2015*, dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk mempermudah investor untuk melakukan investasi di Rwanda; melakukan sosialisasi sistem *cashless* melalui media *The New Times*, serta adanya kerja sama antara *Ministry of Finance and Economic Planning's* (MINECOFIN) dan NBR untuk mengeluarkan program *Rwanda Payment System Strategy: Towards a cashless Rwanda 2018-2024*.¹⁸ Program-program tersebut khususnya telah memberikan dampak yang cukup positif bagi kemajuan ICT di Rwanda.

Hasil yang terlihat dari dijalankannya beberapa program tersebut antara lain di tahun 2013, jumlah penyedia jasa layanan *internet* meningkat menjadi sepuluh dengan jumlah pengguna 1,2 juta dari total sebanyak 12 juta penduduk. Jumlah ini

¹⁶ Xinhua, *Rwanda steps up campaign to go cashless*. XinhuaNet 16 November 2017. Diakses 13 November 2019. http://www.xinhuanet.com/english/2017-11/16/c_136757709.htm

¹⁷ Rwanda Gov, *National ICT Strategy and Plan NICI – 2015*. Rwanda Gov 2015. Diakses 17 November 2019. https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/National_Strategies_Repository/Rwanda%20NCSS%20NICI_III.pdf

¹⁸ Samuel Baker, *Electronic payments: Enabling a cashless economic transformation*. The New Times 29 November 2017. Diakses 28 Agustus 2019. <https://www.newtimes.co.rw/section/read/224505>

meningkat pesat apabila dibandingkan dengan tahun 2002 yang hanya dua jasa penyedia layanan *internet* dan total pengguna hanya 25,000.¹⁹ Di tahun 2015, sebuah *start up* lokal yang bergerak dalam bidang teknologi menciptakan sebuah sistem transportasi pintar atau *smart transportation*, yakni menyediakan layanan *internet* gratis di dalam bus, juga pembayaran yang dilakukan dengan cara *tap and go*. Pembayaran tersebut dilakukan dengan mengisi saldo kartu pintar atau *smart cards* melalui gerai atau langsung melalui akun *Mobile Money* (MoMo).²⁰ Selain itu, pemerintah juga melakukan kerja sama global seperti *Andela Contract*, membangun *Kigali Innovation City* (KIC), serta kembali terpilih sebagai Dewan *International Telecommunication Union* (ITU) untuk meningkatkan jumlah penetrasi *internet*.²¹ Namun, untuk menjadi sebuah negara yang sepenuhnya *cashless*, dapat dikatakan bahwa perjalanan Rwanda masih cukup jauh.

Beberapa hal yang menjadi kendala pemerintah dalam mewujudkan *cashless society* di Rwanda antara lain di tahun 2016, penduduk Rwanda yang masih belum memiliki akses terhadap jasa keuangan masih sebesar 11%, sementara 89% lainnya masih terbagi lagi kedalam kelompok-kelompok, antara lain sebesar 26% yang memiliki akun bank, 42% memiliki akun non-bank, 21% pengguna mekanisme

¹⁹ Nirit Ben-Ari, *Big dreams for Rwanda's ICT sector*. United Nations Africa Renewal April 2014. Diakses 25 September 2019. <https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2014/big-dreams-rwanda%E2%80%99s-ict-sector>

²⁰ Correspondent, Rwanda. *Rwanda's cashless bus payment system to be exported soon*. Africa News 28 April 2019. Diakses 25 September 2019. <https://www.africanews.com/2016/04/28/rwanda-s-cashless-bus-payment-system-to-be-exported-soon/>

²¹ Eugene Kwibuka, *2018: the five milestones that shaped Rwanda's ICT sector*. The New Times 25 Desember 2019. Diakses 25 September 2019. <https://www.newtimes.co.rw/news/2018-five-milestones-shaped-rwandas-ict-sector>

informal yang tidak diatur oleh peraturan pemerintah.²² Data di tahun 2018 juga menunjukkan bahwa tingkat melek huruf atau *literacy rate* masyarakat Rwanda hanya sebesar 73,2% dari keseluruhan total populasi masyarakat yang berumur lima belas tahun keatas.²³ Selain itu, populasi masyarakat Rwanda di tahun 2019 juga masih belum merata, karena jumlah masyarakat yang tinggal di daerah urban hanya sebesar 17% atau sekitar 745,261 dari total populasi sebesar 12,754,987.²⁴ Selama berupaya menerapkan sistem *cashless*, beberapa kendala juga masih kerap terjadi.

Sejauh ini, masyarakat masih lebih memilih menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi. Hal ini disebabkan tingginya biaya transaksi menggunakan *digital payment* sehingga membuat para penggunanya enggan menggunakan sistem pembayaran elektronik, baik melalui jasa penyedia keuangan resmi seperti bank, maupun jasa penyedia keuangan digital lainnya.²⁵ Sebagai contoh, ketika ingin melakukan transaksi pembayaran sebesar Frw 20,000, maka biaya tambahan yang harus dibayarkan sebesar Frw 600.²⁶ Sehingga transaksi dengan menggunakan layanan digital sangat membebankan masyarakat, khususnya bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

²² Chris Skinner, *Rwanda – Africa’s first cashless economy?*. Bank NXT 12 Desember 2017. Diakses 10 September 2019. <https://banknxt.com/62332/rwanda-cashless-economy/>

²³ UNESCO, *Rwanda – Education and Literacy*. UNESCO 2018. Diakses 22 November 2019. <http://uis.unesco.org/en/country/rw>

²⁴ World Population, *Rwanda Population 2019*. World Population Review. Diakses 13 November 2019. <http://worldpopulationreview.com/countries/rwanda-population/>

²⁵ The New Times, *Rwanda to go cashless by 2024: are you on board?*. The New Times 5 Desember 2017. Diakses 25 September 2019. <https://www.newtimes.co.rw/section/read/224911>

²⁶ National Bank of Rwanda (NBR), *Rwanda’s Cashless Economy Drive*. YouTube 5 April 2018. Diakses 25 September 2019. Online video clip, <https://www.youtube.com/watch?v=cDoRdyUFIw>

perjalanan Pemerintah Rwanda untuk mewujudkan sebuah *cashless society* masih cukup jauh.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dalam mewujudkan *cashless society* di negaranya, dengan judul “**Upaya Pemerintah Rwanda dalam Mewujudkan *Cashless Society* pada Era Globalisasi Digital (2015-2018)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Adanya perkembangan ICT dan sistem pembayaran non-tunai atau *cashless payment* mendorong negara-negara maju untuk menerapkan sistem ini di negaranya karena dianggap memiliki banyak keuntungan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Namun, era globalisasi digital saat ini telah memungkinkan banyak negara selain negara maju, termasuk Rwanda yang juga tertarik untuk menerapkan sistem *cashless* agar mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya mencapai target di tahun 2035 sebagai bagian dari negara-negara yang tergabung dalam golongan MIC. Berbagai upaya juga mulai dilakukan oleh pemerintah agar sistem *cashless* segera berjalan di Rwanda.

Rwanda sendiri sempat mengalami keterpurukan akibat genosida yang terjadi pada 7 April 1994, dimana meskipun hanya terjadi selama kurang dari seratus hari, namun dampak yang dihasilkan sangat besar sehingga meninggalkan

trauma dan luka yang cukup mendalam bagi para masyarakat Rwanda. Namun beruntung berkat kehadiran peran yang diberikan oleh Paul Kagame sebagai Presiden Rwanda, melalui berbagai programnya berhasil membawa Rwanda mengalami pemulihan baik secara sosial maupun ekonomi. Bahkan hingga saat ini tengah mencoba untuk menerapkan sistem *cashless* di negaranya dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi.

Beberapa program atau kebijakan yang menjadi upaya Pemerintah Rwanda dalam mewujudkan sebuah *cashless society* di negaranya telah dilakukan, seperti menjalankan program NICI yang diadopsi dari kebijakan *Rwanda's Vision 2020* yang secara khusus berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan sektor ICT di Rwanda, mengeluarkan kebijakan *The New Investment Law of 2015* pada bulan Mei 2015 yang bertujuan untuk memudahkan para investor domestik maupun asing yang ingin melakukan investasi di Rwanda, dan yang terakhir untuk mewujudkan Rwanda sebagai negara yang *cashless* pada tahun 2024 MINECOFIN bekerja sama dengan NBR mengeluarkan *Rwanda Payment System Strategy: Towards a cashless Rwanda 2018-2024*. Serta program-program lainnya yang diharapkan mampu membawa Rwanda berhasil melalui berbagai tantangan dalam mewujudkan sebuah *cashless society*, seperti meningkatkan layanan MoMo dengan melakukan kerja sama dengan pihak *World Remit*, salah satu layanan kirim uang secara internasional yang dapat dilakukan melalui sistem *online*, melakukan kerja sama dengan perusahaan Andela, melakukan pembangunan *Kigali Innovation City* yang bekerja sama dengan Africa50, serta terpilih kembali menjadi anggota Dewan ITU pada tahun 2018 setelah sebelumnya sempat terpilih pada tahun 2010.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara spesifik membahas upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda untuk mewujudkan sebuah *cashless society* di negaranya pada era globalisasi digital saat ini, khususnya pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Tujuan Pemerintah Rwanda ingin menerapkan sistem *cashless* di negaranya tidak lain untuk menjadikan Rwanda sebagai salah satu negara yang masuk dalam kategori MIC pada tahun 2035 mendatang. Selain itu, melihat negara lain, khususnya negara maju telah lebih dulu menerapkan sistem *cashless* di negaranya menunjukkan bahwa sistem ini ikut membantu percepatan pertumbuhan ekonomi negara.

Terkait dengan pembatasan waktu, di tahun 2015, Pemerintahan Paul Kagame mengeluarkan sebuah kebijakan baru, yakni *The New Investment Law of 2015* yang memudahkan para investor, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan investasi di Rwanda, khususnya dalam bidang TIK atau ICT. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum's Global Information Technology* juga menyebutkan bahwa pada tahun ini, Rwanda dinobatkan sebagai negara teratas yang dinilai berhasil dalam mempromosikan dan mengembangkan sektor ICT.²⁷ Selain itu, program NICI yang dijalankan oleh Pemerintah Rwanda pada periode ketiga di tahun 2015 tersebut juga berfokus pada pertumbuhan sektor ICT yang merupakan dasar utama dalam menjalankan sistem

²⁷ Edwin Musoni. *Is Rwanda Making the Most of growing investments in ICT?*. The New Times 17 April 2015. Diakses 7 Januari 2020. <https://www.newtimes.co.rw/section/read/187921>

cashless. Sementara untuk mencapai target di tahun 2024 menjadi negara yang sepenuhnya *cashless*, maka MINECOFIN bekerja sama dengan NBR untuk mengeluarkan beberapa strategi yang bernama *Rwanda Payment System Strategy: Towards a cashless Rwanda 2018-2024*.

1.2.3. Perumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian yang akan dilakukan, penulis merumuskan masalah kedalam suatu pertanyaan penelitian, “Bagaimana Pemerintah Rwanda Mengupayakan *Cashless Society* pada Era Globalisasi Digital Tahun 2015-2018?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dengan mendeskripsikan perkembangan teknologi pada era globalisasi digital saat ini yang telah menghadirkan cara baru dalam melakukan transaksi, yakni sistem pembayaran digital atau *digital payment* yang sifatnya non-tunai atau *cashless*. Menjelaskan apa saja keuntungan yang didapatkan oleh suatu negara apabila menerapkan sistem *cashless* di negaranya. Selain itu, menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dalam mewujudkan *cashless society* selama tahun 2015 hingga 2018, seperti mengeluarkan berbagai

program maupun kebijakan yang mendukung tercapainya sebuah *cashless society* di Rwanda.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Apabila penelitian ini telah selesai, diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi terhadap kepustakaan Hubungan Internasional mengenai studi tentang *cashless society* yang diterapkan di Rwanda pada tahun 2015-2018. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain yang juga tertarik untuk membahas topik serupa.

1.4. Kajian Literatur

Di tahun 2013, sebuah lembaga penelitian dalam bidang perekonomian internasional yang berbasis di London, *International Growth Center* (IGC) mengeluarkan sebuah makalah kerja atau *working paper* dengan topik *The Regulation of Mobile Money in Rwanda*.²⁸ Makalah tersebut secara khusus mengatakan bahwa penggunaan MoMo sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di pedesaan. Hal ini dikarenakan fitur yang ditawarkan oleh MoMo, seperti penyimpanan yang terjamin aman, mempermudah penarikan dan transfer dana dengan biaya yang lebih rendah, serta kenyamanan lain yang lebih baik dari bank.

²⁸ Jonathan Argent, dkk. *The Regulation of Mobile Money in Rwanda*. International Growth Centre (IGC). Working Paper Agustus 2013. Hlm 1. Diakses 10 September 2019. <https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2014/09/Argent-Et-Al-2013-Working-Paper.pdf>

MoMo juga memberikan fasilitas pengiriman uang domestik dengan biaya yang jauh lebih rendah, menyediakan layanan pembayaran jarak jauh untuk listrik, maupun gaji karyawan perusahaan.²⁹ Dengan kata lain, kehadiran MoMo sangat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi secara *cashless*, cepat dan mudah. Akan tetapi, makalah ini juga menemukan adanya beberapa kekurangan dalam penggunaan MoMo, sehingga harus ditinjau lebih lanjut agar mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Beberapa diantaranya adalah mempersiapkan kerja sama dengan *Mobile Network Operators* (MNO) atau operator penyedia jaringan yang mendukung kelancaran transaksi, serta layanan kerja sama antara MNO dan bank, seperti melakukan transfer dari sebuah akun bank ke akun MoMo.³⁰ Demikian dengan pemerintah yang masih harus terus melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan agar semakin mempermudah transaksi non-tunai atau *cashless transaction* di Rwanda.

Makalah kerja yang dikeluarkan oleh IGC di atas telah memberikan kontribusi terhadap penulis terkait kondisi layanan keuangan *cashless* yang telah berjalan di Rwanda di tahun 2013, atau dengan kata lain situasi yang terjadi sebelum Pemerintah Rwanda mengeluarkan kebijakan *The New Investment Law of 2015*. Selain itu, makalah ini juga menunjukkan bahwa selain kesiapan masyarakat, untuk mewujudkan sebuah *cashless society*, pemerintah dan pihak lain yang terlibat juga harus ikut mempersiapkan diri, seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang

²⁹ Argent, *Loc.cit*, hlm 1.

³⁰ *Ibid*, hlm 1.

teknologi, bank, para investor, pembangunan infrastruktur yang mendukung, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Wakil Rektor Universitas Kigali, Alfred Nuwagaba, di tahun 2014 mengeluarkan sebuah jurnal berjudul *Reality of Having a Cashless Society in Rwanda: Case Study National Bank of Rwanda*.³¹ Secara singkat, jurnal ini memperlihatkan kenyataan yang terjadi di Rwanda ketika mencoba untuk menerapkan *cashless society* di negaranya, khususnya yang terjadi pada NBR. Alfred menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak bank maupun pemerintah dalam mewujudkan *cashless society* masih belum maksimal, dimana fasilitas dan layanan untuk melakukan transaksi *cashless* masih belum merata. Jurnal ini juga secara langsung memberikan kritik terhadap pemerintah agar segera meningkatkan keamanan dan penegakan hukum supaya tidak ada lembaga atau oknum yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan sistem *cashless*. Lebih lanjut, Alfred juga seolah mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan investasi modal besar dalam infrastruktur ICT, melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak lain untuk mencapai sebuah *cashless society*.³² Dengan kata lain, jurnal ini menjelaskan bahwa selain kesiapan dari masyarakat, pemerintah juga harus segera berbenah dan mempersiapkan diri sebelum seolah memaksa masyarakat untuk menjadi sebuah *cashless society*, khususnya dalam mempersiapkan infrastruktur yang mendukung.

³¹ Alfred Nuwagaba, *Reality of Having a Cashless Society in Rwanda: Case Study – National Bank of Rwanda*. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) Vol. III Issue 3. Maret 2014. Diakses 10 September 2019. [https://www.ijbmi.org/papers/Vol\(3\)3/Version-2/H0332063069.pdf](https://www.ijbmi.org/papers/Vol(3)3/Version-2/H0332063069.pdf)

³² *Ibid*, hlm 68.

Di tahun 2018, *International Journal of Management and Commerce Innovation* mengeluarkan sebuah jurnal yang berjudul *Effect of Cashless System on Financial Performance of Commercial Banks in Rwanda: A Case Study of Cogebanque* yang ditulis oleh Liliane Uwineza, Patrick Mlyungi dan Oluoch Omach.³³ Secara singkat, jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem *cashless* telah memberikan lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif. Meskipun dalam menerapkan sistem *cashless* membutuhkan modal yang cukup besar, terutama bagi pihak bank untuk mengurangi biaya berlangganan perbankan *Point of Sales* (POS), perbankan seluler atau *mobile banking*, serta perbankan internet atau *internet banking* sebagai langkah untuk mengurangi kenaikan biaya.³⁴ Namun, upaya yang dilakukan tersebut diyakini akan meningkatkan jumlah pelanggan yang menggunakan layanan transaksi elektronik atau *e-transaction* karena dinilai lebih mudah dilakukan dan sangat menghemat waktu.³⁵ Meskipun membutuhkan upaya yang sedikit lebih banyak, namun apabila berhasil akan membawa keuntungan yang cukup besar bagi perekonomian negara.

Kedua artikel di atas telah memberikan kontribusi terhadap penulis, karena telah menunjukkan bahwa Rwanda masih harus terus memperbaiki dan membangun fasilitas yang memadai untuk menjalankan sistem *cashless*. Tidak hanya untuk pihak pemerintah, namun juga pihak perbankan agar terus meningkatkan pelayanannya dan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan negara. Selain itu,

³³ Liliane Uwineza, dkk, *Effect of Cashless System on Financial Performance of Commercial Banks in Rwanda: A Case Study of Cogebanque*. *International Journal of Management and Commerce Innovations* Vol. VI, Issue I. September 2018. Diakses 10 September 2019. Hlm 1.

³⁴ *Ibid*, hlm 13.

³⁵ *Ibid*, hlm 13.

ketidakmerataan jumlah masyarakat yang menggunakan sistem *cashless* masih harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan upaya mewujudkan sebuah *cashless society*. Oleh karena itu, penulis ingin mencoba untuk merangkum dan melengkapi penelitian mengenai *cashless society* di Rwanda, khususnya pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Penulis ingin melihat sejauh mana sistem *cashless* telah berjalan di Rwanda.

Dari ketiga artikel yang telah disebutkan tersebut di atas, penulis melihat bahwa artikel kedua yang ditulis oleh Alfred Nuwagaba mengandung kritik yang cukup realistis, dimana selain memaksakan masyarakat untuk siap menjadi sebuah masyarakat non-tunai atau *cashless society*, pemerintah juga masih harus melakukan pembenahan dari dasar, secara perlahan dan realistis agar mendapatkan hasil yang maksimal. Karena meskipun memiliki target untuk menjadi sebuah negara *cashless* di tahun 2024, penulis melihat bahwa kesiapan masyarakat dan sistem pemerintahan masih belum cukup baik dan dikatakan siap.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sebuah masyarakat non-tunai atau *cashless society* menurut Agus D. W. Martowardjojo, Gubernur Bank Indonesia, mengatakan bahwa masyarakat yang mengurangi penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran memiliki definisi sebagai sebuah lingkungan dimana orang-orang terbiasa menggunakan alternatif instrumen lain dalam melakukan pembayaran yang sifatnya non-tunai, terutama

dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi.³⁶ Sementara masyarakat non-tunai atau *cashless society* dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung menggunakan layanan perbankan, dimana layanan ini memungkinkan para penggunanya mengubah instrumen uang tunai menjadi non-tunai dalam kegiatan ekonomi.³⁷ Namun, tentu saja terdapat beberapa indikator yang memungkinkan sebuah masyarakat dapat disebut sebagai sebuah *cashless society*, yakni ketika sistem pembayaran berjalan dengan baik dan cepat tanpa menggunakan uang tunai, tidak hanya menggunakan kartu melainkan juga alternatif lain yang lebih luas dan mudah, terdapat *voicebot* atau pesan otomatis ketika melakukan pembayaran sehingga dinilai lebih transparan, dan lain sebagainya.³⁸ Menurut sebuah artikel yang dikeluarkan oleh *MasterCard*, sebuah perusahaan jasa keuangan multinasional Amerika, mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan termasuk kedalam sebuah *cashless society* apabila melakukan sekitar 90% transaksi dengan menggunakan uang elektronik.³⁹ Akan tetapi untuk menerapkan sistem *cashless* dibutuhkan infrastruktur ICT yang kuat agar dapat berjalan dengan baik.

Meskipun hingga saat ini masih belum ada definisi yang tepat mengenai ICT, namun menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), ICT merupakan kumpulan dari beragam perangkat teknologi dan

³⁶ Abbas, Antragama Abbas. *Literature Review of a Cashless Society in Indonesia: Evaluating the Progress*. International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 8, No. 3, Juni 2017. <http://www.ijimt.org/vol8/727-DT0028.pdf>

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Woutersen, Marcel. *Five Global Indicators that we are heading towards a cashless future*. Worldline. Diakses 7 Januari 2020. https://be.worldline.com/nl/home/newsroom/general-press-releases/2018/pr-2018_06_04_01.html

³⁹ MasterCard. *MasterCard's Advisors' Cashless Journey*. World Beyond Cash. Diakses 7 Januari 2020. https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2013/09/Cashless-Journey_WhitePaper_FINAL.pdf

sumber daya yang digunakan untuk mengirim, menyimpan, membuat, berbagi ataupun bertukar informasi.⁴⁰ Perangkat teknologi dan sumber daya yang dimaksud antara lain komputer, *internet* (situs web, blog dan email), teknologi siaran langsung (radio, televisi dan siaran web), teknologi siaran yang direkam (*podcasting*, pemutar audio dan video, serta perangkat penyimpanan), dan telepon.⁴¹ Sebuah sistem pembayaran non-tunai atau *cashless payment* sendiri mengubah uang tunai kedalam bentuk uang elektronik atau *electronic money* atau seringkali disingkat dengan istilah *e-money*, sehingga untuk mewujudkan sebuah *cashless society* sangat dibutuhkan adanya infrastruktur ICT yang baik.

Pada era globalisasi digital saat ini, pertumbuhan infrastruktur ICT memang sangat diperlukan, terlebih untuk negara berkembang agar mampu terus mengalami pertumbuhan ekonomi maupun sektor lain di negaranya. Era globalisasi digital sendiri menurut Perusahaan McKinsey, merupakan era baru dalam arus global atau dengan arti lain merupakan masa transmisi informasi, ide dan inovasi di seluruh dunia yang memperluas partisipasi ekonomi global.⁴² Akan tetapi untuk dapat mengikuti atau tergabung kedalam era globalisasi digital, maka sebuah negara harus siap. Merujuk kepada teori *Stage of Economic Growth* Walt Whitman Rostow,

⁴⁰ UNESCO. *Information and Communication Technologies (ICT)*. UNESCO. Diakses 12 November 2019. <http://uis.unesco.org/en/glossary-term/information-and-communication-technologies-ict>

⁴¹ *Ibid.*

⁴² McKinsey Global Institute. *Digital Globalization: The New Era of Global Flows*. McKinsey & Company Maret 2016. Diakses 7 Januari 2020. <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Digital%20globalization%20The%20new%20era%20of%20global%20flows/MGI%20Digital%20globalization%20Executive%20summary.ashx>

sebuah negara minimal berada pada tahapan kedua dari keseluruhan lima tahapan untuk menjadi sebuah negara maju.

Walt Whitman Rostow mengatakan bahwa negara harus melalui lima tahapan, yakni *the traditional society* atau tahap tradisional, *the preconditions to take-off* atau prakondisi lepas landas, *the take-off* atau tahap lepas landas, *the drive to maturity* atau tahap bergerak ke kedewasaan, dan *the age of high mass consumption* atau konsumsi massal yang tinggi.⁴³ Namun, untuk berpindah dari tahap satu ke tahap lainnya suatu negara harus melalui proses yang cukup panjang.

Sebagai negara berkembang, saat ini Rwanda telah berada pada tahap kedua, dimana menurut Rostow, pada tahap kedua sebuah negara mulai melakukan berbagai pendirian industri dan mulai meningkatkan penggunaan modal dalam pertanian, serta mulai memerlukan pendanaan asing. Selain itu, tabungan dan investasi juga mulai meningkat, mulai terbentuknya lembaga dan organisasi tingkat nasional, serta perubahan-perubahan lain yang seringkali dipicu oleh pihak dari luar negara.⁴⁴ Tahap kedua atau *preconditions to take-off* ini dapat berlangsung selama sepuluh hingga lima puluh tahun. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam pengelolaan ekonomi, sehingga ikut berdampak pada keterbatasan produksi yang mempengaruhi hasil akhir (*output*) yang berbeda pada setiap negara, termasuk Rwanda.⁴⁵ Dengan kata lain, untuk mencapai tahap ketiga atau *the take-off*,

⁴³ W. W. Rostow (1959), 'The Economic History Review: The Stages of Economic Growth'. Second Series, Vol. XII, No. 1, hal. 1.

⁴⁴ Rostow, *Loc.cit.*, hlm 4-7.

⁴⁵ Times Reporter, *Service sector inspires Rwanda's transition from shaky agriculture*. The New Times 6 Januari 2008. Diakses 7 September 2019.
<https://www.newtimes.co.rw/section/read/99828>

Pemerintah Rwanda masih harus mempersiapkan lebih banyak hal dalam berbagai aspek di negaranya.

Memasuki tahun 2006, Rwanda mengklaim negaranya telah berada pada tahapan kedua menurut W. W. Rostow, yakni *preconditions to take-off*. Hal ini dikarenakan Rwanda mulai menyadari pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di negaranya, melihat fakta bahwa sektor jasa menjadi penyumbang GDP terbesar negara, yakni sekitar Frw 176,5 miliar, dibandingkan dengan sektor agrikultur yang hanya sebesar Frw 573,3 juta, padahal sektor agrikultur melibatkan lebih banyak tenaga kerja masyarakat Rwanda.⁴⁶ Sementara memasuki tahun 2007, menteri pendidikan Rwanda saat itu, Dr. Jean d'Arc Mujawamariya juga mengatakan bahwa negaranya telah memiliki sebanyak empat belas universitas.⁴⁷ Keseriusan Pemerintah Rwanda dalam meningkatkan sektor jasa terlihat dari didirikannya *Rwanda Enterprise Investment Company* (RIEC) dan kerja sama antara *Commercial Bank of Rwanda* (CBR) dan *South Africa's GroFin*.

RIEC merupakan sebuah perusahaan yang didirikan untuk membantu pendanaan modal para perusahaan baru untuk berkembang. Sementara, kerja sama antara BCR dan *South Africa's GroFin* memberikan dana modal ventura senilai \$43 juta untuk memperluas dan mendorong pertumbuhan produk untuk ekspor.⁴⁸ Di tahun 2008, *Rwanda Investment and Export Promotion Agency* (RIEPA) mengeluarkan sebuah laporan tahun 2007 yang menunjukkan bahwa sektor jasa

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Times Reporter, *Loc.cit.*

telah melampaui sektor-sektor lainnya, menghasilkan sebesar Frw 173.5 miliar dan telah menciptakan sebanyak 3,290 pekerjaan, berbeda dengan sektor lainnya yang hanya menghasilkan Frw 13 miliar.⁴⁹ Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengembangkan berbagai sektor lain dalam lingkup jasa untuk menambah pemasukan negara.

Salah satu sektor lain yang juga menjadi fokus pemerintah untuk dikembangkan yakni pariwisata. Rwanda berhasil mendapatkan investasi dari *Dubai World* sebesar \$230 juta untuk mengembangkan pelajaran olahraga *golf* di Nyarutarama agar sesuai dengan standar internasional, membangun sebanyak 300 apartemen perumahan kelas atas, hotel bintang lima, dan berbagai proyek lainnya.⁵⁰ Sementara itu, khususnya dalam sektor ICT, para investor mendorong investor lain lewat salah satu satelit televisi bergengsi di Amerika Serikat, CNN, melalui *broadsheet* mereka. Majalah *Fortune* juga menuliskan artikel mengenai beberapa alasan mengapa para eksekutif barat tertarik pada Negara Rwanda sebagai negara yang tepat untuk melakukan investasi dengan judul '*Why CEOs love Rwanda*'.⁵¹ Dengan demikian, upaya pemerintah memperoleh bantuan pendanaan asing dapat dikatakan berhasil.

Selain beberapa hal penting di atas, media, khususnya media massa juga memiliki peran tersendiri dalam mendukung Pemerintah Rwanda mewujudkan *cashless society*. Denis McQuail (1983) dalam teori fungsionalis mengenai media, menyampaikan bahwa ada lima kategori yang menjadi maksud kehadiran media

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Export, *Rwanda – Market Overview*. Export 7 November 2019. Diakses 30 November 2019. <https://www.export.gov/article?id=Rwanda-Market-Overview>

⁵¹ Export, *Loc.cit.*

dalam masyarakat, yakni informasi, korelasi, kontinuitas, hiburan dan mobilisasi.⁵² Maksudnya, media menghasilkan informasi tentang berbagai informasi dan kondisi dalam masyarakat, menginterpretasikan informasi tersebut dengan mendukung otoritas dan norma-norma, serta membangun konsensus; mengekspresikan budaya dominan dan perkembangan budaya baru, memelihara nilai-nilai bersama, menyediakan kesenangan dan pelengah waktu dan mengurangi ketegangan sosial; memobilisasi opini dan tindakan untuk mendukung tujuan-tujuan sosial bersama yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti pekerjaan dan perkembangan sosial.⁵³ Pada era globalisasi digital saat ini, kehadiran media terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak, termasuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Rwanda untuk mengenalkan sistem *cashless* kepada masyarakat.

Khususnya dalam memberikan informasi terhadap pihak luar, maupun dalam negara, Rwanda memiliki perusahaan swasta terbesar yang bergerak dalam bidang media, yakni *The New Times*. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995, tepatnya satu tahun setelah terjadinya genosida terhadap etnis Tutsi berakhir. Media *The New Times* tersedia dalam berbagai *platform*, termasuk cetak maupun digital yang mencakup berita lokal, regional maupun global terkait dengan bisnis, serta peristiwa yang diberikan kepada masyarakat di Rwanda.⁵⁴ Tentu saja media *The New Times* ini juga sangat bermanfaat bagi Pemerintah Rwanda karena dianggap

⁵² Graeme Burton. *Media dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra 2012. Hlm 83.

⁵³ Burton, *Loc.cit*, hlm 83.

⁵⁴ The New Times, *About Us: Our Company*. Rwanda's Leading Daily. Diakses 9 September 2019. <https://www.newtimes.co.rw/our-company>

memudahkan penyampaian informasi terbaru kepada masyarakat maupun pihak luar terkait dengan sistem *cashless* yang sedang diupayakan.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena pengambilan data yang dilakukan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari fenomena dan perilaku tertentu.⁵⁵ Selain itu, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk menjabarkan temuan atau fenomena, menyajikan apa adanya sesuai dengan fakta atau temuan di lapangan.⁵⁶

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, serta data primer maupun sekunder untuk memperoleh data. Penulis akan mengumpulkan dokumen atau data yang bersumber pada literatur berbasis *internet*, buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian. Selain itu, juga akan mengambil data dari sumber-sumber resmi, seperti dokumen pemerintah maupun pernyataan resmi tokoh terkait.

⁵⁵ David Hizkia Tobing, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm 8. Diakses 22 Februari 2019. <https://simdos.unud.ac.id/uploads/filependidikan1dir/870ba33936829bb37ecd8f62f8514ba7.pdf>

⁵⁶ *Ibid*, hlm 10.

1.7.Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab pembahasan. Bab I akan memuat Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas mengenai Era Globalisasi Digital, dimana perkembangan ICT telah ikut berkontribusi dalam menghadirkan sistem pembayaran yang bersifat non-tunai atau *cashless payment* yang saat ini telah diterapkan di banyak negara dan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bab III membahas mengenai profil Negara Rwanda dan kepemimpinan Paul Kagame sebagai Presiden Rwanda sejak tahun 2000 hingga saat ini. Khususnya membahas bagaimana peran yang diberikan oleh Paul Kagame dalam membangun perekonomian negara setelah genosida melalui berbagai program yang dibentuk secara khusus untuk meningkatkan sektor-sektor yang ada. Di bab ini juga penulis akan membahas sejauh mana kesiapan masyarakat Rwanda menjadi sebuah *cashless society* serta tantangan-tantangan apa saja yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dalam mengupayakan *cashless society* agar berjalan dengan baik di Rwanda.

Bab IV membahas upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda, baik secara domestik maupun internasional untuk mewujudkan sebuah *cashless society* di negaranya melalui berbagai program maupun kebijakan yang dibentuk.

Bab V berisi hasil akhir penelitian dan kesimpulan atau inti utama dari penelitian yang telah dilakukan.